

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Kajian Ilmu Hubungan Internasional sangatlah kompleks, karena permasalahan yang dimunculkan seputar polemik politik internasional kian hari kian sulit. Karena dalam polemik yang muncul sering kali menyamarkan tujuan utama, seperti hal kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Alasan yang dikumandangkan adalah demokrasi, namun sepertinya ada alasan lain dibalik itu.

Dalam tulisan ilmiah ini mengangkat judul ‘Standar Ganda Amerika Serikat (AS) Terhadap Pemilu Mesir 2005 dan Pemilu Iran 2005’. Yang dimaksud standar ganda (*ambiguous*) adalah sikap inkonsistensi. Penulis memiliki alasan mengangkat judul ini karena penulis menduga bahwa ini hanyalah permainan kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah untuk menguasai minyak bumi, maka penulis ingin menganalisa lebih lanjut akan tindakan Amerika Serikat tersebut.

Maksud judul ini sendiri adalah adanya sikap yang tidak *fair* yang dilakukan Amerika Serikat dalam menjalin hubungan dengan Mesir dan Iran. Satu sisi Mesir sebagai negara yang mencoba menerapkan demokrasi namun terjadi kecurangan dalam pemilu 2005, justru AS mendukung pemerintahan terpilih. Sedangkan Iran yang jelas dalam pemilu 2005 demokrasi berjalan dengan baik, justru Amerika Serikat tidak mendukung hasil pemilu tersebut.

B. Tujuan Penulisan

1. Sebagai salah satu prasyarat guna memperoleh gelar kesarjanaan S-1, pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kepentingan Amerika Serikat di Mesir dan Iran.
3. Memberikan penjelasan tentang faktor yang menyebabkan Amerika Serikat cenderung memihak hasil Pemilu Mesir 2005 daripada hasil pemilu Iran 2005.

C. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan sistem yang dipuja-puja oleh hampir sebagian negara-negara di dunia dan juga para insan politik. Istilah “demokrasi” itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratia* yang berarti pemerintahan. Hampir tidak ada satu rezim pun di dunia ini baik di negara-negara kapitalis maupun komunis, maju maupun berkembang, timur maupun barat, utara maupun selatan, yang enggan menggunakan embel-embel demokrasi pada sistem politik di negaranya.

Di era modern, sekurang-kurangnya ada empat nilai dasar demokrasi yang bersifat universal. Yaitu, pemilihan umum yang jujur dan adil; pers yang bebas; adanya akuntabilitas (accountability) pemerintahan kepada rakyat; dan pengakuan hak sipil rakyat.¹ Negara akan dikatakan sebagai negara demokrasi jika sudah menjalankan keempat pondasi dasar demokrasi yang disebutkan diatas.

¹ Sidik Jatmika, *Amerika Penghambat Demokrasi*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2000, Hal. Vii.

Amerika Serikat, seperti yang kita ketahui dikenal sebagai “Bapaknya” demokrasi, sering membanggakan diri sebagai “*champion of democracy*” (juara demokrasi) dan “*the guardian of democracy*” (pengawal demokrasi) dengan tradisi demokrasi yang kokoh dan kuat sejak diproklamirkannya Deklarasi Kemerdekaan 4 Juli 1776 bahkan sampai saat ini.²

AS senantiasa mengembar-gemborkan untuk menegakkan pelaksanaan demokrasi di seluruh dunia.³ Hal tersebut dipertegas dengan dikeluarkannya Doktrin Carter (1980) yang berusaha mengaitkan masalah penegakkan hak asasi manusia dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap negara lain. Amerika Serikat bahkan tidak segan-segan menjatuhkan sanksi politik, ekonomi, maupun militer terhadap negara-negara yang dianggap kurang menghormati hak asasi manusia.⁴ Kepedulian politik dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap moralitas dan hak asasi manusia mendorong pemerintahan Jimmy Carter memberikan penonjolan retorika atas persoalan ini jauh lebih banyak dibandingkan pemerintahan siapapun dalam sejarah politik Amerika Serikat.⁵ Adapun upaya penegakan hak asasi manusia ke seluruh dunia bisa ditempuh melalui jalan damai hingga kemungkinan terburuk berwujud konfrontasi. Burn .H Weston menguraikan berbagai tindakan yang dilakukan suatu negara terhadap

² James Baker, pidato bagi World Affairs Council, di Dallas, dalam Melvin I. Urofsky, *Basic Readings In US Democracy*, United States Information Agency, Washington DC, 1994, p 354-355

³ Donald P. Komers and Gilbert D. Loescher eds., *Human Rights and American Foreign Policy*, University noter Dame Press, London, 1979

⁴ Cecil V. Crabb, Jr., *The Doctrines of foreign Policy, Their meaning, Role, and Future*, Louisiana State University Press, Baton, Rounge and London, 1982, p. 107-139

⁵ David P. Forstythe, *Hak-hak Asasi Manusia dan Politik dunia*, Penerbit Angkasa Bandung, 1993, hal. 141

negara lain yang dianggap memiliki catatan pelanggaran hak asasi manusia.

Berbagai tindakan tersebut antara lain:⁶

- a. Protes yang bersifat rahasia kepada pemerintah yang bersangkutan.
- b. Protes bersama yang dibuat dengan pemerintah-pemerintah negara lain.
- c. Pernyataan keprihatinan secara terbuka baik di parlemen maupun di tempat lain.
- d. Dukungan bagi pembicaraan-pembicaraan dalam badan seperti Komisi PBB mengenai Hak-hak Asasi Manusia untuk menyelidiki situasi.
- e. Dimulainya segera tindakan demikian dalam badan-badan internasional.
- f. Pembatalan atau penundaan kunjungan tingkat menteri.
- g. Pengekangan kontak-kontak budaya dan olah raga.
- h. Embargo penjualan senjata.
- i. Pengurangan bantuan program.
- j. Penarikan duta besar.
- k. Penghentian semua bantuan.
- l. Pemutusan semua hubungan diplomatik.
- m. Sanksi-sanksi perdagangan.
- n. Sanksi-sanksi militer.

Wujud dukungan Amerika Serikat dalam menegakkan demokratisasi di dunia dapat terlihat pada masa pemerintahan Ronald Reagan, Presiden Ronald Reagan dari Partai Republik ini sebagai pengganti Jimmy Carter melanjutkan upaya Amerika Serikat menegakkan hak asasi manusia ke seluruh dunia. Amerika

⁶ Burn H. Weston, "Hak-hak Asasi Manusia" dalam T. Mulya Lubis, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia, Isu dan Tindakan*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 1993, hal. 28

Serikat melakukan tindakan keras memberantas musuh-musuh demokrasi dengan tekad “To Make America Great Again”. Contoh tindakan Reagan dalam menegakkan demokrasi adalah Reagan melibatkan diri dalam melindungi orang-orang tertentu yang mengalami tekanan oleh rejim-rejim otoriter.⁷ Hal ini pula lah yang akan ditunjukkan dalam pandangan Amerika Serikat terhadap pemilu presiden Mesir 2005 dan pemilu presiden Iran 2005.

Pada tanggal 7 September 2005 yang lalu, Mesir menyelenggarakan pemilu presiden secara langsung dengan sistem multikandidat untuk pertama kalinya. Setelah sebelumnya, pemilihan presiden berasal dari calon tunggal dan melalui referendum. Tentu saja, kandidat terkuat tetap dipegang oleh presiden Mesir yang lalu, Hosni Mubarak dari Partai Nasional Demokrasi. Meskipun ada dua kandidat lain dari kelompok oposisi yang cukup dikenal, yaitu : Noaman Gomaa dari Partai Wafd dan Ayman Nour dari Partai Ghad tidak akan memberikan perlawanan yang cukup berarti. Pada tanggal 9 September 2005 Ketua Pemilu Mesir mengumumkan hasil akhir penghitungan suara yang menunjukkan kemenangan mutlak Hosni Mubarak dengan jumlah 6.316.786 suara (88,6%) dari 7.305.063 suara yang masuk, Ayman Nour memperoleh 540.405 suara (7,6%), dan Noaman Gomaa memperoleh 208.891 suara (2,9%).⁸

Tuduhan-tuduhan kecurangan pun dilayangkan dalam pemilu kali ini, terutama kepada kubu Hosni Mubarak. Para pemantau lokal dan partai-partai oposisi melaporkan terjadi penekanan-penekanan dan intimidasi dari Partai Demokrasi Nasional di seluruh TPS-TPS di Mesir. Selain itu, Partai Nasional

⁷ Riza Sihbudi, dkk, *Profil Negara-Negara Timur Tengah*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hal. 30

⁸ *Mubarak Terpilih Kembali Sebagai Presiden Mesir*, Kompas, 11 September 2005

Demokrat yang merupakan partai dari Hosni Mubarak, juga menjanjikan makanan dan uang kepada warga miskin jika mencoblos Hosni Mubarak. Dalam pemilu kali ini pun Mesir menolak mengizinkan pengamat internasional memantau pemilihan ini dan baru mengizinkan para pemantau lokal masuk TPS dua jam sebelum pemilihan dimulai.⁹ Dari hal diatas jelas terlihat bahwa terdapat kejanggalan-kejanggalan yang cenderung menunjukkan kepada kecurangan.

Berbeda dengan pemilu presiden yang diselenggarakan Iran pada tanggal 17 Juni 2005, pada pemilu presiden ke-9 ini, seperti halnya dalam pemilu-pemilu presiden sebelumnya, hampir semua spektrum politik Iran terwakili. Akan tetapi pada pemilu kali ini terjadi dua kali putaran dalam pemilihan presiden yaitu pemilu putaran pertama pada tanggal 17 Juni dan putaran kedua pada tanggal 24 Juni 2005. Antusias rakyat Iran pun cukup tinggi dalam pemilu kali ini, sekitar 65% dari mereka yang mempunyai hak pilih menyalurkan aspirasinya. Tingginya tingkat partisipasi politik rakyat dalam pemilihan presiden ini cukup untuk membuktikan bahwa demokrasi masih hidup di Iran.

Dari ketujuh kandidat yang ikut bertarung dalam putaran pertama, tiga diantaranya mewakili kubu kiri (reformis), yaitu : Mostafa Moin, Mehdi Karoubi, dan Mohsen Mehralizadeh. Tiga kandidat lainnya berasal dari kubu kanan (konservatif), yaitu: Mahmoud Ahmadinejad, Mohammad Baqer Qolibaf, dan Ali Larijani. Ali Akbar Hashemi Rafsanjani sendiri berasal dari kubu tengah (moderat).¹⁰

⁹ *Pemantau Pemilu Mesir Laporkan Adanya Intimidasi Partai Berkuasa*, 8 September 2005 (diunduh 21 Januari 2008); dikutip dari: www.kapanlagi.com

¹⁰ *Iran, As dan Demokrasi*, 23 Juni 2005 (diunduh 21 Januari 2008); dikutip dari www.republikaonline.com

Dalam pemilihan presiden putaran pertama tidak ada satu pun kandidat yang dapat memperoleh 50% suara, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani memperoleh 21,13% suara, disusul Mahmoud Ahmadinejad dengan 19,43% suara, Mehdi Karoubi dengan 17,24% suara, Mostafa Moin dengan 13,93% suara, Mohammad Baqer Qolibaf dengan 13,89% suara, Ali Larijani dengan 5,83% suara, dan Mohsen Mehralizadeh dengan 4,38% suara. Pada putaran kedua, Mahmoud Ahmadinejad menang telak atas pesaingnya Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, Mahmoud Ahmadinejad memperoleh 17.248.782 suara (61,69%), sementara Ali Akbar Hashemi Rafsanjani memperoleh 10.046.701 suara (35,93%). Dengan perolehan 61,69% suara maka Ahmadinejad ditetapkan sebagai presiden terpilih Republik Islam Iran.¹¹

Adapun mengenai tanggapan Amerika Serikat terhadap hasil pemilu Mesir dan Iran ini sudah dapat di pastikan sebelumnya, bahwa apapun hasil pemilu presiden Iran akan mendapat reaksi negatif dari para pejabat Amerika Serikat. Seperti halnya yang dilontarkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Condoleezza Rice, bahwa pemilihan presiden Iran gagal untuk mewujudkan demokrasi negara itu, karena calon presiden ditentukan oleh pemimpin-pemimpin agama yang tidak dipilih oleh rakyat.¹²

Berbeda dalam menanggapi hasil pemilu presiden Mesir, pejabat pemerintahan Amerika Serikat seakan-akan tidak mengetahui kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan presiden yang diselenggarakan di Mesir pada tanggal 7 September 2005, padahal jelas-jelas kecurangan tersebut

¹¹ http://en.wikipedia.org/wiki/iranian_presidential_election._2005 (diunduh 9 Februari 2009)

¹² *Pemilu Iran Gagal Wujudkan Demokrasi*, 20 Juni 2005 (diunduh 9 Januari 2008); dikutip dari www.kapanlagi.com

dilakukan dan banyak bukti yang menunjukkan hal tersebut, tetapi AS tetap mendukung hasil pemilu tersebut .

D. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang permasalahan diatas, maka timbullah pertanyaan yang akan menjadi pokok kajian pada penulisan ini, yaitu : **”Mengapa Amerika Serikat cenderung memihak hasil Pemilu Presiden Mesir 2005 daripada Pemilu Presiden Iran 2005?”**

E. Kerangka Dasar Teori

1. Konsep Demokrasi

Istilah “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani, yakni *demos* yang berarti “rakyat”, dan “kratia” yang berarti “pemerintahan”. Yang dimaksud “rakyat” di Yunani kuno (Athena), menurut Robert A. Dahl sangat berbeda dengan apa yang kita pahami sekarang. Bagi orang Yunani kuno, “rakyat” tidak lebih dari sekumpulan manusia dari sebuah polis atau kota kecil. Hal ini membawa konsekuensi logis bahwa apa yang disebut sebagai demokrasi dalam pengertian aslinya pun berbeda dengan demokrasi dalam pemahaman kontemporer.

Dalam pemahaman Yunani kuno, demokrasi harus memenuhi enam syarat: warga Negara harus cukup serasi dalam kepentingan mereka; mereka harus padu dan homogen; jumlah warga Negara harus kecil (bahkan kurang dari 40.000); warga Negara harus dapat berkumpul dan secara langsung memutuskan legislasi; warga negara juga berpartisipasi aktif dalam pemerintahan’, dan Negara kota

harus sepenuhnya otonom. Syarat-syarat ini jelas jauh berbeda dengan demokrasi “modern”.

Dari perspektif demokrasi kontemporer, dalam teori maupun praktek, bahwa kewarganegaraan dalam demokrasi Yunani amat *eksklusif* dan bukan *inklusif* seperti demokrasi modern. Dan dalam pandangan kaum republiken yang aristokratis, fungsi rakyat yang sesungguhnya bukanlah memerintah, seperti yang mereka lakukan di Athena, tetapi lebih memilih pemimpin yang cukup memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas berat memerintah seluruh Negara. Disini pengertian demokrasi sudah mulai “bergeser”. Karena demokrasi secara klasik terutama sekali partisipasi warga Negara secara langsung, jadi hakekat demokrasi bersifat *partisipatif*.

Sementara itu, Robert A. Dahl mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah system politik. Yakni, sistem politik yang sepenuhnya responsive terhadap semua warga Negara.¹³ Agar suatu negara dapat diperintah secara demokratis, menurut Dahl diperlukan dua syarat utama, yakni: *pertama*, militer dan polisi harus berada di bawah pengawasan sipil; *kedua*, sipil yang mengendalikan militer itu sendiri harus tunduk pada proses demokrasi. Sehingga dengan demikian, kekuatan persuasif lebih diutamakan daripada kekuatan koersif. Selain itu, diperlukan suatu tatanan yang disebut sebagai poliarki, yakni suatu tatanan politik yang pada tingkatnya paling umum dibedakan menjadi dua ciri: kewarganegaraan diperluas sampai mencakup bagian yang relatif tinggi dari dewasa, dan hak-hak kewarganegaraan mencakup kesempatan untuk menentang dan memberhentikan

¹³ Robert A. Dahl, *Participation And Opposition*, New Heaven, Yale University Press, 1971, hal. 2

para pejabat tinggi dalam pemerintahan dengan melalui pemberian suara. Poliarki juga merupakan suatu tatanan politik yang dibedakan oleh tujuh lembaga: para pejabat yang dipilih; pemilu yang bebas dan adil; hak suara yang inklusif; hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan; kebebasan menyatakan pendapat; informasi alternatif; serta otonomi asosiasional.

Suatu Negara dapat dikatakan sebagai Negara demokrasi jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Jika sarana tindakan pemaksaan dengan kekerasan dinetralkan.
2. Jika negara itu memiliki suatu masyarakat majemuk yang dinamis dan modern.
3. Jika kekuasaan pemerintahan tidak hanya terpusat kepada kepala negara saja, tetapi wakil presiden atau perdana menteri tetap memiliki kekuasaan.
4. adanya pemilu yang jujur dan adil.
5. Jika negara itu secara budaya homogen atau heterogen, tidak terbagi-bagi dalam beberapa sub kultur yang kuat dan berbeda atau jika terbagi-bagi seperti itu, para pemimpin harus berhasil dalam menciptakan suatu tatanan.
6. Konstitusional untuk mengatur konflik-konflik sub kulotur.
7. Jika negara itu tidak mengalami intervensi dari pihak negara luar yang anti demokrasi.¹⁴

¹⁴ Robert A. Dahl, *Demokrasi Dan Para Pengkritiknya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992, hal. 86

Dilihat dari beberapa faktor diatas, maka Mesir belum bisa dikatakan sepenuhnya demokrasi, karena tidak memenuhi beberapa syarat yang diajukan Dahl tersebut. Ini bisa dilihat dimana masih dilakukan kecurangan-kecurangan maupun kekerasan dalam pemilu 2005 dan pemilu multikandidat pun ternyata tidak menjadi pemilu yang sepenuhnya adil dan demokratis. Berbeda dengan proses pemilu di Iran 2005, pemilu di Iran lebih demokratis, karena selain banyaknya partisipasi dari masyarakat, pemilu tersebut juga lepas dari tekanan-tekanan maupun intervensi dari pihak asing.

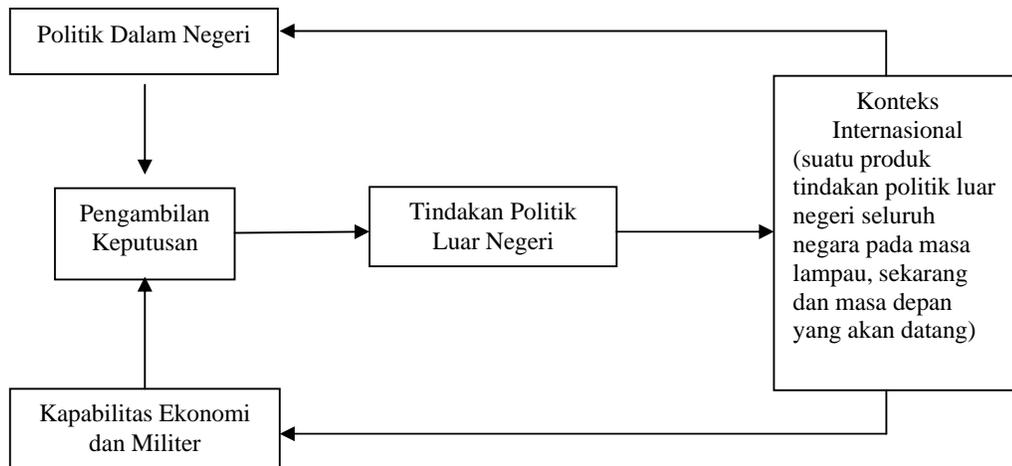
2. Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri

Untuk menjelaskan mengenai fenomena yang terjadi, penulis akan menguraikan teori proses pembuatan keputusan luar negeri William D. Choplin¹⁵:

Gambar

Pengambilan Kebijakan Politik Luar Negeri

William D. Coplin



Dalam gambar diatas, William D. Coplin menyebutkan ada tiga faktor yang berpengaruh dalam menghasilkan suatu tindakan politik luar negeri.

Pertama, situasi politik dalam negeri. Dalam sebuah sistem politik, banyaknya tuntutan dan dukungan yang bisa kita kategorikan ke dalam sebuah

¹⁵ Teori pembuatan Kebijakan Luar Negeri yang diungkapkan oleh William D. Choplin dalam buku Introduction to International Politics : A Theoretical Overview (terjemahan M. Marbun), CV, Sinar Bandung, 1992, hal, 30.

input, dalam suatu sistem politik sangat mempengaruhi langkah selanjutnya dalam proses pengambilan kebijakan. Input-input yang berupa dukungan dan tuntutan inilah yang nantinya akan membentuk kondisi politik dalam negeri suatu negara. Kondisi politik dalam negeri inilah yang akan sangat mempengaruhi para pembuat keputusan dalam mengambil kebijakan luar negeri. Bagaimanakah kondisi masyarakat terhadap suatu isu politik yang beredar, apakah ada tuntutan ataupun dukungan dari masyarakat itu sendiri. Kondisi pemerintahan yang sedang berkuasa saat itu juga berpengaruh terhadap kebijakan yang nantinya akan dibuat.

Situasi politik dalam negeri suatu negara termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik manusianya. Disamping nilai-nilai demokrasi yang dianut oleh bangsa Amerika Serikat, peran kelompok kepentingan (*lobby yahudi*) dan media massa mempunyai andil yang cukup besar dalam mempengaruhi pengambilan keputusan tindakan politik luar negeri yang akan dilakukan terhadap negara lain.

Kedua, kapabilitas ekonomi dan militer. Kemampuan ekonomi dan militer suatu negara sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang akan diambil, karena dapat mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perekonomian suatu negara dapat dijadikan sebuah tolak ukur bagi kemampuan dan *bargaining position* negara dalam pergaulan internasional. Besarnya anggaran negara yang digunakan untuk sarana militer juga bisa dijadikan ukuran kekuatan negara untuk melindungi kepentingan nasional negara tersebut. Ekonomi dan militer merupakan salah satu dari kapabilitas yang dibutuhkan negara untuk menjamin terwujudnya

kepentingan nasional. Semakin baik perekonomian dan militer suatu negara akan mampu menyeimbangkan antara kepentingan nasional dengan kapabilitasnya.

Kapabilitas ekonomi dan militer suatu negara termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan keamanan. Ditinjau dari kapabilitas ekonomi, sebagai negara kapitalis, Amerika Serikat mempunyai pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi yang didukung oleh industri maju di segala bidang, juga perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di luar negeri, sehingga dolar Amerika Serikat menguasai transaksi ekonomi dunia. Untuk menggerakkan industrinya, Amerika Serikat membutuhkan cadangan minyak yang cukup besar. Sejauh ini Amerika Serikat mencoba mengembangkan energi alternatif seperti tenaga surya dan tenaga angin, tetapi kurang efektif untuk memenuhi kebutuhan energi yang begitu besar. Jika suplai minyak terhambat dan keamanan suplai terganggu, dapat mempengaruhi sektor ekonomi nasional Amerika Serikat. Jika ekonomi terguncang, maka akan berdampak pada sektor lain, seperti sosial, politik, militer dan keamanan. Sedangkan Timur Tengah merupakan sumber minyak dunia, dan Iran merupakan negara pengekspor minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi. Akan tetapi Iran merupakan negara yang sulit didekte oleh Amerika Serikat dan tidak mau menerima bantuan apapun dari Amerika Serikat.

Dari kapabilitas militer, setelah berakhirnya Perang Dingin, Amerika Serikat muncul sebagai negara super power tunggal. Untuk mewujudkan tujuan cita-cita nasional serta memenuhi kebutuhan utama dalam negerinya Amerika Serikat menggunakan kekuatan militernya jika perlu, guna mencapai,

mempertahankan dan melindungi kepentingan nasionalnya. Dikatakan, bahwa untuk melindungi dan mencapai kepentingan nasionalnya, tujuan kemandirian nasional Amerika Serikat adalah untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas, jika perlu mengalahkan pihak lawan yang mengancam Amerika Serikat, kepentingannya dan sekutu-sekutunya.¹⁶

Ketiga, situasi dan kondisi internasional. Pengkajian tentang perilaku suatu negara juga di fokuskan pada konteks internasional yang mempengaruhinya. Sifat sistem internasional dalam hubungan antar negara dengan kondisi-kondisi dalam sistem itu menentukan bagaimana negara itu akan membuat sebuah kebijakan. Situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi merupakan pertimbangan bagi *decision maker* dalam menentukan arah kebijakan luar negeri suatu bangsa.

Konteks Internasional yaitu situasi di suatu negara dimana politik luar negeri ditujukan serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan terpilihnya Ahmadinejad sebagai presiden Iran, maka Amerika Serikat mendapat penghalang besar untuk menancapkan hegemoninya di Timur Tengah karena sosok Ahmadinejad tidak akan pernah tunduk pada Barat, terutama Amerika Serikat. Lain halnya dengan Mesir, yang selalu tunduk dan patuh kepada sebagai boneka Amerika Serikat.

¹⁶ “*National Military Strategy*” ditanda tangani oleh John M. Shalikashvili, Chairman of The JCS (diunduh septemner 1998); dikutip dari www.dtic.mil/jcs/core/strategy.htm.

F. Hipotesa

Berdasarkan pada permasalahan yang ada dan didukung oleh kerangka teori yang diterapkan, maka dapat dirumuskan hipotesa dari faktor-faktor yang menyebabkan Amerika Serikat cenderung memihak hasil Pemilu Presiden Mesir 2005 daripada Pemilu Presiden Iran 2005. *Pertama*, faktor politik dalam negeri, yaitu Lobby Yahudi atau juga sering disebut Lobby Israel ini mempunyai pengaruh yang kuat dalam setiap menentukan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Sedangkan Iran mempunyai hubungan yang buruk dengan Yahudi (Israel), dan Mesir dengan Yahudi (Israel) mempunyai hubungan yang cukup baik. *Kedua*, konteks internasional, dengan terpilihnya Ahmadinejad sebagai presiden Iran, harapan Amerika untuk kembali mengendalikan Iran seperti zaman kekuasaan Syah Iran dulu tidak akan pernah terwujud, karena Ahmadinejad merupakan sosok yang anti barat, khususnya Amerika Serikat. Berbeda dengan terpilihnya Hosni Mubarak sebagai presiden Mesir, Hosni Mubarak pro Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat dapat dengan mudah mengendalikan Mesir.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan terhadap masalah politik luar negeri Amerika Serikat di Mesir dan Iran pada tahun 2005. Serta menganalisa aksi-aksi Amerika Serikat terhadap kedua negara pada tahun 2005. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam penelitian.

H. Metode Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu tehnik pengumpulan data dengan mencari data-data dari kepustakaan buku, informasi-informasi berdasarkan literatur atau referensi baik yang bersumber artikel-artikel, majalah-majalah, surat kabar, jurnal, internet, dan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti penulis.

I. Sistematika Penulisan

Sebagai sebuah penulisan deskriptif, penulis membuat sub-sub pokok yang dapat menguraikan permasalahan untuk dapat menjawab pokok permasalahan diatas.

Dalam bab I ini memuat Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah, Perumusan masalah, Kerangka Teoritis, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan

Dalam bab II ini akan dijelaskan mengenai dasar-dasar politik luar negeri Amerika Serikat, yang diantaranya: anti imperialisme, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, dan penciptaan stabilitas keamanan yang damai. Disaming itu juga akan dijelaskan mengenai tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, yang diantaranya: keamanan nasional, perdamaian dunia, pemerintahan sendiri, perdagangan bebas, dan kepedulian terhadap kemanusiaan

Dalam bab III ini akan diuraikan mengenai proses pemilu Mesir 2005, proses pemilu Iran 2005 dan sikap Amerika Serikat lebih mendukung hasil pemilu Mesir 2005 daripada hasil pemilu Iran 2005

Dalam bab IV ini akan diuraikan faktor-faktor yang menyebabkan Amerika Serikat lebih mendukung hasil pemilu Mesir 2005 daripada pemilu Iran 2005, yang diantaranya dikarenakan oleh: Lobby Yahudi dan sikap Presiden Hosni Mubarak dan Presiden Mahmoud Ahmadinejad terhadap Amerika Serikat.

Dalam bab V ini akan memuat tentang kesimpulan dari masalah yang telah dibicarakan dalam bab-bab sebelumnya.